

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menciptakan manusia-manusia cerdas yang dapat membangun bangsa melalui ide dan kreativitas yang dimiliki. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai “starting point”, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan. Keberhasilan dari suatu proses pendidikan tidak terlepas dari adanya keberadaan guru.

Guru memegang peran penting dan strategis dalam dunia pendidikan. Guru sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih para siswa merupakan agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku siswa menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih mandiri.

Hal ini didukung oleh pendapat Djamarah yang dikutip Mulyasa, bahwa:

Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan di masyarakat<sup>1</sup>.

Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar, pendidik dan sebagai pegawai. Yang paling utama adalah kedudukannya sebagai pengajar dan pendidik, yakni sebagai guru. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.), hal.3

kedudukannya sebagai guru ia harus menunjukkan kelakuan yang layak bagi guru menurut harapan masyarakat. Guru sebagai pendidik dan pembina generasi bangsa harus menjadi teladan, di dalam maupun di luar sekolah. Dalam menjalankan peranannya guru memiliki fungsi salah satunya adalah mengoptimalkan potensi dasar serta kualitas dari peserta didik. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Guru juga salah satu faktor dalam mencapai keberhasilan suatu tujuan pendidikan karena guru yang langsung berhadapan dengan peserta didik yaitu untuk memberikan pembelajaran, bimbingan yang nantinya akan mencetak peserta didik yang berkualitas. Namun demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya.

Walaupun sekarang ini guru dituntut untuk lebih profesional dengan cara diadakan pelatihan dan seminar pendidikan tapi masih banyak guru yang memiliki kinerja yang rendah. Menurut Balitbang Kemendikbud mencatat, “guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SMA Negeri 64,73% dan swasta 65,29%<sup>2</sup>, hal ini menunjukkan bahwa tingkat guru yang layak mengajar di SMA negeri lebih rendah dari pada guru di SMA swasta.

Khusus guru ekonomi, berdasarkan pemerhati dunia pada workshop pembelajaran ekonomi yang digelar Dewan Pendidikan Jatim di Batu tahun 2011 mengatakan bahwa, hanya 42,6 % dari 2,6 juta orang guru ekonomi atau 1,1 juta

---

<sup>2</sup><http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/07/191877/Uji-Ulang-Kompetensi-Guru-Sertifikasi>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2012 pukul, 12.05 WIB

orang guru bidang studi ilmu ekonomi yang kini telah memenuhi kualifikasi baik atau berkualitas baik. rendahnya kualifikasi guru ekonomi juga menyebabkan orientasi pendidikan ekonomi di sekolah cenderung pada aspek kognitif siswa dan metode pembelajaran yang membosankan<sup>3</sup>. Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu supervisi yang dilakukan kepala sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tunjangan guru dan kepemimpinan kepala sekolah. Supervisi yang ada di sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dan pegawai lainnya merupakan suatu yang amat dibutuhkan untuk memantau perkembangan kinerja guru. Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor merupakan yang terintegrasi dengan fungsi administrasi pendidikan lainnya. Kepala sekolah merupakan sosok sentral yang menjadi tumpuan bagi pengambilan kebijakan pada tataran sekolah, baik sebagai administrator, motivator, ataupun supervisor. Akan tetapi, dalam banyak kasus di lapangan, seringkali kepalasekolah lebih banyak berperan sebagai seorang penguasa tunggal pada tingkatan sekolah yang memiliki kekuasaan penuh atas segala kepemilikan aset sekolah, pendapatan dan pemasukan keuangan sekolah, atau penentuan ‘nasib’ para pegawainya. Kepala sekolah seperti itu sering kali bertindak sewenang-wenang dalam pengambilan kebijakan-kebijakannya. Bagi para guru yang dapat mengambil hati mempunyai peluang untuk “kecipratan rezeki” dari “kerakusan kepala sekolah tersebut. Tapi, bagi para guru yang mengambil ‘garis oposisi’ dan berani melawan berbagai kebijakan kepala sekolah atau setidaknya tidak menurut kepala sekolah guru tersebut tidak patuh maka, harus bersiap-siap untuk menerima berbagai sanksi

---

<sup>3</sup>(<http://www.antaraneews.com/print/252595/hanya-426-persen-guru-ekonomi-berkualitas-baik>) diakses pada 24 September 2012 pukul 19.00 WIB

seperti, kenaikan pangkatnya dipersulit, rezekinya dipotong ditengah jalan, promosi jabatan tidak diurus dan sebagainya.

Kondisi yang demikian itu, sama artinya tindakan mencari-cari kesalahan atau kekurangan bawahannya. Supervisi tersebut merupakan ajang untuk melakukan penekanan-penekanan. Dalam situasi seperti itu, suasana yang muncul adalah suasana ketakutan seperti, takut berbuat kesalahan, takut dimarahi, takut keliru, atau takut yang tidak beralasan. Hal ini akan menciptakan suasana yang tidak nyaman dalam bekerja, inisiatif dan kreatifitas guru tidak akan berkembang apabila model supervisi yang dilakukan kepala sekolah seperti diatas. Hal ini juga dapat berpengaruh pada kinerja guru.

Padahal supervisi bukan hanya menilai baik atau buruk suatu tindakan, tetapi supervisi bertujuan untuk menambah kualitas kerja pada guru agar selalu berusaha untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Peningkatan ini hanya akan dapat dicapai melalui peran komunikasi yang lebih efektif<sup>4</sup>.

Keberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran ditunjang dari kelengkapan sumber belajar disekolah. Kegiatan belajar mengajar akan terlaksana maksimal, apabila sumber belajarnya lengkap dan berfungsi untuk menunjang kegiatan tersebut. Menurut Soetjipto sarana prasarana adalah Semua benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>5</sup>. Dengan kata lain, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen

---

<sup>4</sup>Stehen Robin, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Preshindo, 1997) hal. 13

<sup>5</sup>Eko Djatmiko, "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru SMP N Kota Semarang", *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, Desember 2006, hh.19-30

penting di sekolah yang dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang nantinya dapat mengembangkan kemampuan guru.

Sarana dan prasarana yang kurang tersedia dapat menyebabkan kurang optimalnya kinerja guru dalam mengajar, namun tunjangan yang biasa diberikan oleh pemerintah dapat memotivasi para guru untuk lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, diharapkan dapat memengaruhi kinerja guru agar lebih baik lagi, seperti yang diungkapkan oleh A. Malik Fadjar pada saat beliau masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, yakni:

Kenaikan tunjangan fungsional guru 50 hingga 60 persen yang berlaku per 1 Agustus 2002, diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja guru yang selama ini belum maksimal. Kenaikan intensif ini diharapkan dapat meringankan beban kehidupan guru dan mendorong guru meningkatkan kinerjanya<sup>6</sup>.

Tunjangan yang diberikan pemerintah dapat memengaruhi kinerja guru lebih baik. Tetapi apabila tunjangan tersebut diberikan belum merata dan dirasakan belum cukup untuk memenuhi biaya hidup yang semakin mahal, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan diri dalam guru. Hal ini dapat berpengaruh buruk pada kinerja guru.

Era globalisasi sekarang ini mendorong pemerintah mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai wujud desentralisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan merupakan masalah yang sangat kompleks dan penting hal ini sesuai dengan Undang- Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: Sistem

---

<sup>6</sup> ELY, *Kenaikan Tunjangan Bisa Picu Kinerja Guru*, Kompas, 2001  
(<http://els.bappenas.go.id/upload/other/kenaikan%20tunjangan%20Bisa.doc>.) Diakses pada tanggal 31 Oktober 2012

pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan berarti berkaitan dengan peningkatan proses belajar mengajar, dalam hal ini diperlukan kinerja yang baik oleh seorang pendidik didalam menyelenggarakan proses belajar di sekolah. Kinerja seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik memang merupakan tanggung jawab pribadi guru itu sendiri. Kenyataannya, ada guru yang kinerjanya baik yakni profesional dan disiplin dalam menjalankan tugasnya begitu juga sebaliknya, ada guru yang memiliki kinerja guru yang buruk yaitu malas, tidak profesional dan tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya, bahkan ada guru yang baru datang kesekolah jika ingin menerima gaji.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja guru diperlukan tanggung jawab guru itu sendiri selain itu, juga diperlukan peranan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan dan keputusan tertinggi di sekolah. Peranan kepala sekolah sebagai penggerak guru harus mampu menggerakkan guru agar kinerjanya menjadi meningkat. Guru akan bekerja secara maksimal apabila didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah kepemimpinan kepala sekolah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 mengenai Pemerintahan Otonomi Daerah maka pola kepemimpinan kepala sekolah intruksional yang selama ini diterapkan di era sentralistik, kini sudah tidak lagi relevan. Karena pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang

bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik, yaitu dimana kepala sekolah dapat mengatur dan mengurus sekolah sesuai dengan kepentingan masyarakat yang dilayaninya menurut gagasannya sendiri. Kepala sekolah mempunyai wewenang yang lebih luas untuk mengaktualisasikan kemampuan manajerialnya demi kemajuan sekolah yang dipimpinnya.

Era desentralistik ini peningkatan kinerja guru sangat penting dilakukan. Untuk peningkatan kinerja guru tersebut perlu adanya sosok pemimpin (kepala sekolah) yang dapat memotivasi bawahannya, memberikan perhatian, membina dan membimbing agar dapat bekerja lebih baik lagi guna mencapai kinerja guru yang lebih baik serta sosok pemimpin yang dapat mengubah paradigma paternalistik feodal menuju kepemimpinan transformasional. Dari hasil penelitian tentang kepemimpinan baik dalam bisnis, industri, pemerintahan, militer maupun institusi pendidikan dan organisasi *non profit* menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional jauh lebih efektif dibandingkan kepemimpinan transaksional<sup>7</sup>. Oleh karena itu, di masa desentralistik ini pemimpi yang bersifat transformasional sangat diperlukan dalam organisasi sekolah agar kinerja guru dapat meningkat sehingga tujuan dari sekolah tercapai.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang dihubungkan dengan kinerja guru di daerah Jakarta Utara.

---

<sup>7</sup> Nahiyah Jaidi Faraz, *Profil Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Asesmen Guru*. ([http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.%20Nahiyah%20Jaidi,%20M.Pd./Artikel\\_Profil%20Kepemimpinan%20Transformasional%20Kepala%20Sekolah%20Menengah%20Atas.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.%20Nahiyah%20Jaidi,%20M.Pd./Artikel_Profil%20Kepemimpinan%20Transformasional%20Kepala%20Sekolah%20Menengah%20Atas.pdf)). Di akses tanggal 8 Maret 2013

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara supervisi kepala sekolah dan kinerja guru?
2. Apakah terdapat hubungan antara sarana dan prasarana belajar dan kinerja guru?
3. Apakah terdapat hubungan antara tunjangan dan kinerja guru?
4. Apakah terdapat hubungan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan kinerja guru?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru ternyata sangat kompleks. Karena keterbatasan kemampuan peneliti, sehingga peneliti hanya membatasi masalah hubungan kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan kinerja guru ekonomi SMA Negeri di Jakarta Utara.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang diteliti oleh peneliti, dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah terdapat hubungan kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan kinerja guru ekonomi SMA Negeri di Jakarta Utara?”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

##### **1. Teoretis**

Menambah khasanah ilmu pengetahuan yang sehubungan dengan kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan kinerja guru.

##### **2. Praktis**

Sebagai masukan kepada lembaga pendidikan dalam memberikan pengetahuan mengenai kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan kinerja guru.